

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Penyelenggara setiap organisasi dalam melakukan kegiatan kerjasama untuk mencapai tujuan organisasi tidak terlepas dari unsur-unsur yang mendukungnya, yang dukungan tersebut memiliki arti bahwa kegiatan organisasi tidak akan terealisasi dengan baik dan membawa hasil yang memuaskan tanpa adanya unsur-unsur pendukung, salah satu unsur administrasi adalah pegawai dan sistem manajemen yang dilaksanakan pada suatu organisasi, kedua unsur tersebut memiliki peran yang sangat penting dalam mencapai tujuan.

Pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pimpinan organisasi sangat tergantung pada faktor utama yang berperan sebagai pelaksana dari semua proses kerja yang akan dilakukan dengan tingkatan yang berbeda-beda antara lower, middle, dan top manajemen, sehingga akan terjalin kerjasama yang baik dalam proses kerja. Top manajemen dalam hal ini adalah pimpinan mempunyai peranan penting dalam menentukan keberhasilan dari suatu organisasi, dan salah satu cara untuk meningkatkan efektivitas kerja pegawai, adalah dengan melaksanakan koordinasi dengan baik, karena koordinasi itu suatu

hal yang sangat penting di dalam suatu organisasi dalam mencapai tujuannya, jika para pimpinan tidak dapat menerapkan koordinasi yang baik maka akan terjadi kekacauan, perselisihan dan kekembaran pekerjaan atau kekosongan pekerjaan sehingga efektivitas kerja tidak tercapai.

Koordinasi termasuk salah satu fungsi dalam manajemen, dalam sebuah organisasi koordinasi berguna untuk mencegah terjadinya kekacauan, percekocokan, dan kekembaran atau kekosongan pekerjaan, masing-masing individu pegawai terarah membantu tercapainya tujuan organisasi dan semua tugas, kegiatan, serta pekerjaan terintegrasi kepada sasaran yang diinginkan dengan cara mengarahkan, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen serta pekerjaan-pekerjaan para pegawai dalam mencapai tujuan organisasi.

Organisasi selain mencukupi kebutuhan untuk organisasinya sendiri harus pula bertanggung jawab terhadap lingkungan sistem yang lebih besar untuk dapat terus hidup, karena itu dibutuhkan suatu efektivitas kerja pegawai yang baik di dalam memenuhi tuntutan masyarakat. Organisasi di dalam memenuhi tuntutan masyarakat hendaknya memperhatikan sumber daya manusia dari para birokrat sangat mutlak dibutuhkan untuk meningkatkan efektivitas kerja pegawai.

Efektivitas kerja menitik beratkan keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya dengan tepat waktu, sehingga tidak terjadi penghamburan waktu, biaya, dan tenaga. Dengan efektivitas kerja, pegawai dituntut untuk menyelesaikan pekerjaan yang dibebankan kepadanya sesuai dengan tepat waktu serta ketelitian dalam melaksanakan pekerjaan. Efektivitas kerja merupakan

gambaran tentang kegiatan yang telah berhasil dilaksanakan atau keberhasilan dalam pencapaian tujuan dengan waktu yang telah ditetapkan sebelumnya. Efektivitas lebih beorientasi kepada keluaran, maka hasil pekerjaan pegawai dapat dikatakan efektif, apabila sesuai dengan rencana kerja yang telah ditentukan, sehingga pekerjaan dapat terselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Dengan hasil yang memuaskan pula.

Efektivitas seseorang dalam usahanya mencapai tujuan-tujuan dalam setiap suasana sosial, tidak hanya pada aktivitasnya sendiri tetapi juga bagaimana hubungan aktivitas itu dengan yang sedang dilakukan orang lain, efektivitas juga merupakan landasan dari setiap organisasi dalam pencapaian suatu tujuan organisasi, karena apabila suatu instansi dapat menyelesaikan setiap pekerjaan dengan efektif dan efisien, maka instansi tersebut sudah dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya manusia yang handal dan terampil.

Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bandung merupakan salah satu instansi pemerintah daerah yang memiliki tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi satuan organisasi pemerintahan di bidang pemuda, olahraga dan pariwisata. Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bandung terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung. Dispopar merupakan unsur pelaksana teknis penyelenggaraan pemerintah daerah, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggungjawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bandung sangat penting sumbangsinya bagi pembangunan nasional dalam bidang pemuda, olahraga dan pariwisata khususnya di Kabupaten bandung, untuk itu maka aparatur atau pegawai yang harus bekerja disana haruslah aparatur daerah yang berdaya guna dan mempunyai efektivitas kerja yang tinggi karena aparatur merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam suatu lembaga pemerintahan disamping faktor lain seperti uang, alat-alat yang berbasis teknologi misalnya komputer dan internet sebagaimana yang tercantum dalam UU No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara,Aparatur Sipil Negara (disingkat ASN) adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

Pegawai ASN terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Aspek organisasi itu terutama pengorganisasian atau kepegawaian. Sumber daya pegawai harus dikelola dengan baik untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi pemerintahan untuk mewujudkan profesional aparatur dalam melakukan pekerjaan khususnya dalam pemerintahan daerah sesuai dengan surat edaran menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi Republik Indonesia No 10 Tahun 2014 Tentang Peningkatan Efektivitas Dan Efisien Kerja Aparatur Negara.

Berdasarkan hasil peninjauan yang peneliti lakukan, pada Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata (DISPOPAN) Kabupaten Bandung terdapat permasalahan masih rendahnya efektivitas kerja pegawai, hal ini terlihat pada indikator-indikator sebagai berikut:

1. Waktu,

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 3 Poin 11 (Masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja), ketetapan waktu pada jam kerja berlaku mulai pukul 7.30 – 16 Wib, namun pada DISPOPAN Kabupaten Bandung masih ada pegawai terlambat masuk dan ada pegawai pada jam istirahat terlihat langsung pulang sebelum jam kerja berakhir.

2. Hasil, ini dapat dilihat dari :

1. Kualitas, Contohnya pada sub bagian umum dan kepegawaian, penataan arsip – arsip dinas yang tidak tertata dengan rapih dilemari arsip dan hanya disimpan di bawah atau atas laci meja, jika dibutuhkan kembali akan mengalami kesulitan dan memakan waktu yang cukup lama.
2. Kuantitas, Contohnya pada Bidang Olahraga, penyusunan laporan 5 buah RKA (Rencana Kerja Dan Anggaran) dan 11 buah Dokumen pelaporan realisasi keuangan akhir tahun, setiap tahunnya kurang dari target tersebut yang tersusun. Sumber Rencana Strategis (Renstra) DISPOPAN Kabupaten Bandung

tahun 2011 – 2016, landasan hukum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4287) dan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintah di Kabupaten Bandung.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka peneliti menduga bahwa rendahnya efektivitas kerja pegawai, ini disebabkan oleh koordinasi berdasarkan ciri – ciri koordinasi, sebagai berikut:

1. Tanggung Jawab, Kurangnya tanggung jawab dan perhatian Kepala Dinas kepada pegawai yang membuat kesadaran pegawai terhadap tupoksinya dan dalam hal menghargai waktu rendah yang menyebabkan pekerjaan selesai melebihi batas waktunya.
2. Adanya Proses, Proses untuk mencapai suatu tujuan yang telah direncanakan kurang maksimal karena kualitas kerja yang dihasilkan pegawai rendah dan pelaksanaan koordinasi kepala Dinas dengan pegawai kurang berjalan dengan baik dan rendahnya tanggung jawab serta perhatian kepada pegawai, serta kurangnya motivasi yang di berikan kepada pegawai oleh kepala Dinas, dalam hal ini penghargaan seperti pujian dan pengakuan lebih agar menciptakan kegairahan dan semangat dalam melaksanakan pekerjaan.

Berdasarkan dari permasalahan diatas, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut dan menjadikan bahan untuk topik dalam penyusunan skripsi yang diajukan sebagai berikut:

**“HUBUNGAN KOORDINASI DENGAN EFEKTIVITAS KERJA
PEGAWAI PADA DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KABUPATEN BANDUNG”**

1 .2 Perumusan Masalah

1. Adakah hubungan koordinasi dengan efektivitas kerja pegawai pada Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Bandung ?
2. Faktor-fakor apa saja yang menjadi penghambat hubungan koordinasi dengan efektivitas kerja pegawai pada Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Bandung ?
3. Usaha apa saja yang harus dilakukan kepala Dinas dalam mengatasi hamabatan yang timbul dalam hubungan koordinasi dengan efektivitas kerja pegawai pada Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Bandung ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menemukan data dan informasi tentang hubungan koordinasi dengan efektivitas kerja pegawai pada Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Bandung.
2. Menganalisis hambatan apa saja yang ada dalam hubungan koordinasi dengan efektivitas kerja pegawai pada Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Bandung.
3. Menerapkan data dan informasi untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam hubungan koordinasi dengan efektivitas kerja pegawai pada Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian terdiri dari kegunaan teoritis yang berdasarkan pertimbangan kontekstual dan konseptual dan kegunaan praktis untuk perbaikan bagi lembaga/instansi yang bersangkutan, Kegunaan penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian dapat memperkaya kepustakaan dalam bidang disiplin ilmu Administrasi Negara, khususnya tentang hubungan koordinasi dengan efektivitas kerja pegawai pada Dinas pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bandung.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan untuk pertimbangan dan sumbangan pemikiran yang bermanfaat mengenai masalah yang menyangkut hubungan koordinasi dengan efektivitas kerja pegawai pada Dinas pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bandung.

a. Bagi peneliti

Menambahkan pemahaman keilmuan khususnya mengenai hubungan koordinasi dengan efektivitas kerja pegawai.

b. Bagi pihak umum

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi pihak umum yang menaruh perhatian dan minat untuk mengkaji lebih lanjut mengenai hubungan koordinasi dengan efektivitas kerja pegawai pada Dinas pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bandung.

1.5 Kerangka Teori

Berkaitan dengan penelitian ini yang mempunyai judul hubungan koordinasi dengan efektivitas kerja pegawai pada Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Bandung, peneliti mengacu pada sebuah teori-teori para ahli yang berhubungan dengan fokus dan lokus dari penelitian dimaksudkan untuk menjadi tolak ukur bahwa teori ini sesuai dengan kenyataan yang terjadi dilapangan sehingga menjadikan kesimpulan yang tepat dan objektif, maka untuk

mengarahkan penelitian ini peneliti bermaksud akan mengemukakan definisi dari para ahli.

Adapun pengertian koordinasi menurut Mooney and Reily dalam Handyanigrat yang berjudul "Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen" (1985:88-89) sebagai berikut :

"Coordination as the achievement of orderly group effort, and unity of action in the pursuit of a common purpose".(Koordinasi sebagai pencapaian usaha kelompok secara teratur dan kesatuan tindakan di dalam mencapai tujuan bersama)

Koordinasi dalam pelaksanaan secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuannya dibutuhkan usaha-usaha yang mampu menciptakan suatu gerak kegiatan dalam organisasi begitupun pengertian Koordinasi menurut Farland, yang dikutip dalam buku Handyaningrat yang berjudul "Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen" (1985:89) sebagai berikut :

"Coordination is the process where by an executive develop an orderly patterns of groups efforts among his subordinates and secure unity of action in the pursuit of common purpose".(Koordinasi adalah suatu proses di mana pimpinan mengembangkan pola usaha kelompok secara teratur di antara bawahannya dan menjamin kesatuan tindakan di dalam mencapai tujuan bersama)

Bertolak dari definisi yang dikemukakan oleh Farland, yang dikutip dalam buku Handyaningrat yang berjudul "Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen" (1985:89-90), terdapat lima ciri untuk Koordinasi yang memadai adalah sebagai berikut :

1. Tanggung jawab
2. Adanya proses
3. Pengaturan secara teratur
4. Konsep kesatuan tindakan
5. Tujuan koordinasi

Alasan utama yang melatari pentingnya pelaksanaan fungsi koordinasi adalah dikotomi yang dihadapi organisasi. Di satu sisi organisasi harus memprioritaskan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, namun di sisi lain organisasi juga tidak boleh mengabaikan tujuan setiap individu pegawai yang pemenuhannya disejalankan dengan mencapai tujuan umum organisasi. Tujuan umum organisasi kemudian diurai menjadi sejumlah sub tujuan dan atau tujuan sejumlah unit kerja organisasi yang harus diupayakan pencapaiannya secara bersama-sama.

Efektivitas kerja pada dasarnya merupakan sejauh mana seorang pegawai melaksanakan seluruh tugas pokok untuk mencapai semua sasaran. Efektivitas sangat penting, karena setiap organisasi akan selalu berusaha meningkatkan produktivitas kerja yang efektif dan efisien. Berdasarkan batasan tentang efektivitas kerja diatas, maka untuk lebih jelasnya akan peneliti kemukakan pengertian efektivitas kerja menurut siagian dala bukunya yang berjudul” Organisasi Kepemimpinan dan Prilaku Administrasi” (1997:151) sebagai Berikut:

Efektivitas Kerja adalah penyelesaian pekerjaan tetap pada waktu yang telah ditentukan, artinya apakah pelaksanaan suatu tugas dinilai baik atau tidak sangat tergantung pada bilamana tugas itu diselesaikan, dan tidak terutama menjawab pertanyaan bagaimana cara melaksanakannya dan berapa biaya yang dikeluarkan.

Bertitik tolak dari definisi yang dikemukakan oleh siagian dalam bukunya yang berjudul "Organisasi Kepemimpinan dan Prilaku Administrasi" (1997:151) bahwa unsur - unsur efektivitas kerja adalah sebagai berikut :

1. Penyelesaian pekerjaan tepat waktu
2. Hasil pekerjaan sesuai dengan yang diharapkan

Uraian di atas menerangkan bahwa efektivitas kerja merupakan suatu kegiatan untuk memberikan suatu hasil atau usaha pencapaian suatu tujuan sesuai dengan waktu dan hasil yang diharapkan. Adapun uraian indikator efektivitas kerja tersebut diatas adalah sebagai berikut :

1. Waktu

Hal ini berhubungan dengan penyelesaian pekerjaan sesuai dengan target yang ditentukan, pemanfaatan waktu yang efisien dapat diperoleh hasil yang maksimal.

2. Hasil

Hasil ini berhubungan dengan pencapaian kegiatan atau usaha yang telah ditetapkan, hasil pekerjaan dan jumlah pekerjaan yang produktif dan berkualitas ditentukan oleh waktu. Hasil kerja dapat dilihat dari :

1. Kualitas, yaitu baik buruknya hasil kerja
2. Kuantitas, yaitu banyaknya jumlah pekerjaan dalam jangka waktu yang telah ditentukan

Berdasarkan pengertian Koordinasi dan Efektivitas kerja diatas, diketahui bahwa untuk membantu meningkatkan efektifitas kerja pegawai tentunya diperlukan seorang pemimpin yang dapat melakukan Koordinasi dalam ruang

lingkup internal dengan baik agar dalam melaksanakan setiap pekerjaan, pegawai dapat terarah sesuai dengan tujuan organisasinya hal ini sesuai dengan pendapat Syafrudin (2003:121) sebagai berikut :

Koordinasi memegang peranan penting dalam meningkatkan efektivitas kerja yaitu melalui kesempatan yang diberikan oleh pemimpin kepada para pegawai untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan serta keterampilannya merupakan unsur yang membentuk kinerja (*performance*) pegawai yang pada akhirnya dapat menunjukkan efektivitas kerja di dalam organisasi.

Jelas manfaat koordinasi sangat menentukan terselenggaranya usaha yang telah diprogramkan untuk mencapai hasil yang diharapkan dalam hal pencapaian tujuan kerja organisasi. Tetapi apabila koordinasi tidak dilaksanakan atas departementasi dan pembagian kerja, akan menimbulkan organisasi yang berjalan sendiri-sendiri tanpa ada kesatuan arah. Untuk mencapai efektivitas kerja pegawai yang optimal diperlukan adanya integrasi antara kesatuan kerja, komunikasi, disiplin, dan pembagian kerja. Dimana jika keseluruhan faktor tersebut sudah terarah maka efektivitas kerja pegawai dapat mencapai prestasi yang diharapkan organisasi. Dengan makin rumitnya proses teknologi dan perkembangannya lingkungan maka peranan manajemen dalam hal ini kepemimpinan dalam mengkoordinasi orang sangatlah perlu guna meningkatkan efektivitas kerja organisasi.

1.6 Hipotesis

Bertitik tolak dari kerangka pemikiran tersebut diatas, maka peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut

A. Hipotesis Penelitian :

1. Terdapat Hubungan Koordinasi Dengan Efektivitas Kerja Pegawai Pada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bandung.
2. Ada faktor-faktor yang menghambat Hubungan Koordinasi Dengan Efektivitas Kerja Pegawai Pada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bandung.
3. Ada usaha yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan Hubungan Koordinasi Dengan Efektivitas Kerja Pegawai Pada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bandung.

B. Hipotesis Statistik :

- a. $H_0 : \rho_s \leq 0$ = artinya tidak terdapat hubungan antara Koordinasi (X) dengan Efektivitas Kerja Pegawai (Y) Pada Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Bandung.
- b. $H_1 : \rho_s > 0$ = artinya terdapat hubungan antara Koordinasi (X) dengan Efektivitas Kerja Pegawai (Y) Pada Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Bandung.

- c. Berikut ini peneliti uraikan paradigma penelitian pada gambar 1.1:



GAMBAR 1.1
PARADIGMA PENELITIAN

Keterangan gambar :

X : Variabel Koordinasi

Y : Efektivitas kerja Pegawai Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
Kabupaten Bandung.

C. Definisi Operasional Variabel :

Berdasarkan hipotesis di atas, maka untuk mempermudah dalam pembahasan selanjutnya peneliti mengajukan definisi operasional variable sebagai berikut:

1. Koordinasi adalah suatu proses di mana Kepala Dinas mengembangkan usaha kelompok secara teratur diantara pegawainya untuk menjamin kesatuan tindakan di dalam mencapai tujuan bersama pada Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Bandung dengan mengaplikasikan lima Ciri Koordinasi yaitu: Tanggung jawab, Adanya proses, Pengaturan secara teratur, Konsep kesatuan tindakan dan Tujuan koordinasi.

2. Efektivitas kerja adalah penyelesaian pekerjaan yang dilakukan para pegawai Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Bandung dengan tepat waktu dan hasil pekerjaan sesuai dengan yang diharapkan Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Bandung berdasarkan Unsur-unsur Efektivitas Kerja yaitu: Penyelesaian pekerjaan tepat waktu dan Hasil pekerjaan sesuai dengan yang diharapkan.

1.7 Lokasi Dan Lamanya Penelitian

a. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan pada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bandung yang ber alamat di Jln. Raya Soreang Km 17 soreang Kabupaten Bandung Jawa Barat.

b. Lamanya Penelitian

Lamanya penelitian dilakukan selama 6 bulan, dari bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Juni 2016 dimulai dari tahap penyusunan usulan penelitian dan sampai kepada tahap sidang skripsi.